

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia tentu menginginkan terciptanya kondisi damai di negara atau wilayah mereka masing-masing. Namun tentu dalam realitanya, menciptakan dan menjaga perdamaian bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain seperti perbedaan kekuatan atau *power* yang dimiliki setiap negara baik dalam bidang militer ataupun ekonomi; perbedaan ideologi negara, sistem politik, sistem pemerintahan, dan yang lainnya; adanya permasalahan internal atau konflik dalam negeri yang dialami setiap negara; dan masih banyak alasan lainnya. Maka dapat dilihat bahwa perdamaian merupakan suatu kondisi yang “mahal” dan sangat penting bagi setiap aktor internasional khususnya bagi aktor negara.

Meskipun begitu, pada kenyataannya perdamaian tidak selalu dapat dirasakan oleh semua negara. Dengan kata lain, konflik atau perang masih sering terjadi di beberapa negara karena berbagai alasan. Dalam hubungan internasional, konflik atau perang merupakan suatu masalah kompleks yang telah mendarah daging dan masih menjadi masalah yang tidak dapat dituntaskan dengan sepenuhnya. Bahkan ada beberapa anggapan yang menilai bahwa perdamaian dunia merupakan suatu hal yang utopis dalam hubungan internasional. Namun meskipun begitu seluruh aktor internasional tentu akan berusaha menjaga perdamaian tersebut sebaik-baiknya, khususnya menjaga perdamaian negara mereka masing-masing.

Jika dilihat pada era kontemporer ini, konflik atau perang masih sering terjadi di beberapa wilayah atau negara di dunia. Bahkan di panggung internasional yang menjadi perhatian bagi para aktor internasional tidak hanya tentang konflik atau perang antar negara, namun konflik seperti perang saudara atau *intrastate war* juga kerap menjadi sorotan aktor internasional. Pasalnya dalam beberapa kasus, perang saudara atau *intrastate war* telah menjadi sorotan aktor internasional karena beberapa hal yaitu karena konflik berlangsung lama, menimbulkan kerugian yang

besar, dan sulit untuk ditangani sendiri oleh pemerintah negara yang mengalami konflik tersebut. Sehingga pada akhirnya membuat aktor internasional yang seharusnya tidak terlibat dalam konflik tersebut menjadi ikut campur tangan untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut atau sekedar terlibat untuk mendorong agar perdamaian segera tercapai. James Fearon seorang profesor asal Amerika Serikat, mendefinisikan perang saudara atau *civil war* sebagai konflik kekerasan dalam suatu negara yang diperjuangkan oleh kelompok-kelompok terorganisir yang bertujuan untuk mengambil kekuasaan di pusat atau di suatu wilayah, atau untuk mengubah kebijakan pemerintah (Fearon, 2007).

Adapun beberapa penjelasan lain menurut para ahli yang menjelaskan dan mengklasifikasikan bagaimana suatu kondisi konflik dapat dikatakan sebagai perang saudara. Meskipun dalam Konvensi Jenewa tidak ada penjelasan mengenai perang saudara secara harfiah namun ada sedikit penjelasan terkait hal ini yaitu didefinisikan dengan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. James Fearon dan David Laitin (2003) menjelaskan beberapa penyebab terjadinya perang saudara pada suatu negara yaitu karena sikap keserakahan; adanya keluhan terhadap sosial ekonomi dan politik suatu negara; banyaknya peluang yang menjadi akar timbulnya perang saudara seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan populasi yang besar. Adapun penjelasan lain yang mengatakan bahwa perang saudara merupakan konflik dengan intensitas tinggi, seringkali melibatkan angkatan bersenjata reguler, dimana konflik ini bersifat berkelanjutan, terorganisir dan berskala besar. Perang saudara dapat memberikan banyak dampak buruk seperti mengakibatkan banyak korban jiwa dan konsumsi sumber daya yang signifikan (Hironaka, 2005).

Perang saudara terus berkembang seiring berkembangnya kekuatan militer dan teknologi setiap negara, hal inilah juga yang membuat perang saudara menjadi isu yang cukup kompleks dalam studi hubungan internasional. Bukti yang dapat menunjukkan bahwa perang saudara merupakan konflik yang sangat rumit yaitu dapat dilihat bahkan hingga detik ini masih terdapat perang saudara yang terjadi di suatu negara atau wilayah. Selaras dengan penjelasan sebelumnya bahwa perang saudara merupakan suatu isu yang menjadi tanggung jawab setiap masing-masing negara, namun karena kondisi seperti ini merupakan permasalahan yang sangat sulit

diselesaikan membuat perang saudara menjadi agenda penting bagi seluruh aktor internasional. Beberapa contoh perang saudara yang cukup dikenal dunia karena banyaknya dampak buruk yang terjadi yaitu perang saudara Amerika yang memakan korban jiwa sekitar 1.000.000 jiwa, lalu konflik internal Myanmar yang memakan korban jiwa sekitar 160.000 jiwa, konflik Taliban di Afghanistan yang memakan korban jiwa sekitar 120.000, dan masih banyak contoh perang saudara di negara-negara lainnya. Bahkan Indonesia pun pernah mengalami beberapa kasus perang saudara dan ada juga yang masih menjadi konflik hingga sekarang ini yaitu konflik di Papua. Adapun salah satu contoh perang saudara yang cukup menarik perhatian para aktor internasional dan juga menjadi salah satu misi perdamaian dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yaitu perang saudara Sudan Selatan.

Sudan Selatan (nama resmi: Republik Sudan Selatan) merupakan sebuah negara berdaulat yang telah memisahkan dan memerdekakan diri negara Republik Sudan pada tahun 2011. Sebelum menjadi negara berdaulat seperti sekarang ini Sudan Selatan juga telah melewati perang saudara sebelumnya di negara Sudan. Republik Sudan telah mengalami berbagai perang saudara dan terdapat dua perang saudara besar yang menjadi akar terpisahnya Sudan Selatan dari negara Sudan. Kedua perang saudara tersebut adalah perang saudara Sudan pertama dan kedua, dimana secara singkat kedua perang saudara ini merupakan konflik antara wilayah Sudan Utara dan Sudan Selatan.

Perang saudara Sudan ini telah berlangsung sejak waktu yang cukup lama, terhitung dimulai dari tahun 1955 dan berakhir pada tahun 2005. Dimana perang saudara tersebut telah memberikan berbagai dampak buruk seperti kerusakan infrastruktur, ketidakstabilan ekonomi, timbulnya jutaan korban jiwa, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu dampak yang juga terjadi setelah perang saudara Sudan tersebut yaitu terpisahnya Sudan Selatan dari negara Sudan menjadi negara sendiri. Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya referendum kemerdekaan Sudan Selatan 2011, dimana pemungutan suara yang dilakukan menunjukkan 98% pemilih (masyarakat Sudan yang mendaftar referendum) mendukung kemerdekaan Sudan Selatan.

Meskipun Sudan Selatan telah berhasil memisahkan diri dan menjadi negara independen namun ternyata mereka masih mengalami ketidakstabilan politik. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perang saudara yang terjadi di negara Sudan Selatan tak lama setelah negara ini memerdekakan diri. Perang saudara Sudan Selatan merupakan perang yang terjadi antara kekuatan pemerintah dan kekuatan oposisi. Perang yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2020 ini merupakan perang saudara multi-sisi, dimana berawal dari konflik antar kekuatan pemerintah kemudian berkembang menjadi konflik antar etnis. Pada akhir tahun 2013 Salva Kiir Mayardit (Presiden Sudan Selatan) menuduh Riek Machar (Wakil Presiden Sudan Selatan) dan beberapa orang lainnya telah mencoba melakukan kudeta pada pemerintahan Presiden Kiir (Koos & Gutschke, 2014). Riek Machar melakukan pembantahan terhadap hal tersebut kemudian melarikan diri dan menjadi pemimpin gerakan atau partai oposisi pemerintahan yang bernama The Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition (SPLM-IO). Hal ini yang menjadi awal konflik perang saudara yang terjadi antara kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Perang yang bermula dari perselisihan politik dalam pemerintahan berkembang menjadi perang bersenjata yang telah menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara Sudan Selatan.

Dampak buruk yang dirasakan oleh negara dan masyarakat Sudan Selatan sangat banyak dan beragam antara lain seperti ketidakstabilan politik dan ekonomi; timbulnya berbagai kekerasan yang dialami oleh masyarakat (kekerasan seksual dan diskriminasi etnis); sekitar tujuh belas ribu anak digunakan sebagai tentara dibawah umur; kelaparan yang dirasakan oleh sekitar enam juta masyarakat; dan sekitar tiga ratus ribu nyawa masyarakat Sudan Selatan melayang akibat konflik ini. Selama berlangsungnya konflik ini, para pihak yang terlibat telah beberapa kali membuat perjanjian damai dan melakukan gencatan senjata. Namun hal tersebut seringkali gagal dan konflik perang saudara kembali muncul dan semakin memanas.

Hal inilah yang membuat para aktor internasional atau negara-negara lain mulai memperhatikan konflik perang saudara yang terjadi di Sudan Selatan. Banyak negara yang sudah terlibat untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut yaitu antara lain Uni Afrika, China, Uni Eropa, AS, Inggris, Norwegia, dan

Intergovernmental Authority on Development (IGAD: blok perdagangan negara di Afrika). Salah satu aktor internasional yang juga memberikan kontribusi besar bagi perdamaian di Sudan Selatan yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB telah membentuk misi perdamaian yang bernama The United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Dalam misi tersebut PBB telah mengirimkan sekitar kurang lebih 20.000 pasukan (militer, polisi, kontingen ahli, petugas staf, dan relawan) untuk menjaga perdamaian dan keamanan disana. Hal ini tentu dilakukan PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki kapabilitas dan kemampuan untuk membantu menjaga perdamaian bagi seluruh negara di dunia. Secara khusus misi perdamaian PBB ini dibentuk untuk melindungi masyarakat sipil di Sudan Selatan dari segala bentuk kekerasan yang ada; membantu pemerintah Sudan Selatan untuk mengembangkan keamanan dan kekuatan hukum mereka; serta menjadi pendorong untuk pembangunan negara dan ekonomi Sudan Selatan.

Para aktor internasional dapat memanfaatkan kemampuan *hard power* dan *soft power* mereka sebagai cara untuk membantu negara Sudan Selatan. Aktor internasional dapat menggunakan *hard power* mereka dengan memanfaatkan kekuatan militer dan ekonomi, dan menggunakan *soft power* dengan memanfaatkan kecerdasan emosional manusia seperti kemampuan diplomasi, komunikasi, pengaruh budaya dan nilai-nilai (Nye, 2008). Upaya perdamaian dengan menggunakan *soft power* dapat menjadi salah satu cara yang efektif ketika *hard power* tidak memberikan dampak yang signifikan. Bentuk *soft power* yang dapat digunakan untuk membantu menciptakan perdamaian di Sudan Selatan yaitu dengan praktik diplomasi. Salah satu aktor internasional yang memanfaatkan kemampuan *soft power*-nya untuk membantu menciptakan perdamaian di Sudan Selatan yaitu Paus Fransiskus.

Praktik diplomasi merupakan proses negosiasi antar aktor atau pihak dari suatu negara dimana hal ini merupakan bentuk konkret dari *soft power* yang berusaha dilakukan oleh Paus Fransiskus. Seiring berkembangnya zaman praktik diplomasi pun mengalami perkembangan, baik dalam praktiknya maupun tekniknya. Salah satunya seperti munculnya konsep *multi-track diplomacy* yang menjelaskan terdapat berbagai jalur yang dapat digunakan sebagai cara atau teknik dalam berdiplomasi. Sebagai pemimpin agama, keterlibatan Paus Fransiskus dalam

upaya perdamaian Sudan Selatan sendiri dapat diklasifikasi dalam jalur ketujuh. Jalur ketujuh dalam konsep *multi-track diplomacy* yaitu diplomasi yang menggunakan elemen atau instrumen agama dalam pelaksanaannya. Dalam berdiplomasi tentu Paus Fransiskus akan menerapkan dan menggunakan unsur-unsur agama khususnya terkait perdamaian.

Paus Fransiskus merupakan aktor internasional yang menaruh perhatian besar pada konflik perang saudara di Sudan Selatan. Dalam dunia internasional, Paus Fransiskus memiliki beberapa peran dan jabatan yaitu sebagai kepala negara Kota Vatikan dan pemimpin umat Katolik sedunia. Eksistensi Paus Fransiskus telah memberikan pengaruh dan kontribusi bagi dunia internasional, baik untuk urusan keagamaan maupun untuk urusan politik. Sebagai pemimpin Katolik sedunia tentu Paus Fransiskus akan mengamalkan ajaran Katolik sebaik mungkin, termasuk dalam menjalankan tugas dan perannya setiap hari. Dalam urusan politik global, Paus Fransiskus mengimplementasikan ajaran gereja yaitu dengan memprioritaskan konsep “*Unity Prevails Over Conflict*” (Gustafson et al., 2018) khususnya dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Konsep tersebut memberikan pandangan kritis mengenai “konflik”, dijelaskan bahwa pada dasarnya memang sulit untuk dapat menyelesaikan dan terlepas dari suatu konflik. Hal tersebut yang membuat terkadang para aktor enggan atau tidak berani untuk terlibat dalam penyelesaian suatu konflik atau perang. Namun Paus Fransiskus mengajarkan bahwa setiap aktor harus memiliki kemauan untuk menghadapi dan membantu konflik yang dijumpai. Dengan kata lain konsep tersebut mengajak agar para aktor yang pada dasarnya mengetahui konflik yang sedang terjadi di sekitarnya dan memiliki kekuatan atau *power* harus mau ikut membantu mengatasi konflik tersebut. Paus Fransiskus sendiri pun berupaya melakukan hal tersebut dengan membantu mengatasi konflik-konflik yang terjadi pada suatu negara dengan kapabilitas dan kemampuannya.

Perlu diketahui bahwa secara tidak langsung segala kepentingan (urusan internasional dan gerejawi) yang dilakukan oleh Paus Fransiskus juga menjadi kepentingan Vatikan, dan begitupun sebaliknya. Salah satu contoh kepentingan yang dilakukan Paus Fransiskus dan Vatikan yaitu berkontribusi dalam menciptakan perdamaian di Sudan Selatan. Kepentingan ini juga terdorong karena

melihat bahwa pemimpin dari kedua belah pihak yang berkonflik di Sudan Selatan tersebut beragama Kristen. Sebagai sesama umat kristiani tentu Paus Fransiskus dapat menjadi mediator dan pendorong untuk mengamalkan ajaran Kristen khususnya yaitu perdamaian.

Perang saudara Sudan Selatan ini telah memberikan banyak sekali kerugian dan dampak buruk bagi masyarakat sipil yang tinggal disana. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa banyak warga disana telah mengalami berbagai isu kemanusiaan yang sangat memilukan. Keterlibatan Paus Fransiskus dalam penyelesaian konflik tersebut juga dilatarbelakangi karena suatu keunikan dari Paus Fransiskus yaitu tidak terlalu bersifat eurosentris. Dengan kata lain Paus Fransiskus juga menaruh perhatian lebih pada negara-negara non-barat (Troy, 2021), bahkan dikatakan sebagai Paus “global” (Franco, 2013) karena prinsipnya tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi pendorong bagi Paus Fransiskus untuk membantu negara-negara yang kurang “terpandang” di mata masyarakat internasional seperti Sudan Selatan. Akan tetapi urgensi terpenting dari konflik Sudan Selatan ini sehingga membutuhkan adanya intervensi kemanusiaan dari para aktor internasional yaitu karena banyaknya isu kemanusiaan yang terjadi dan sulit untuk diselesaikan. Seperti yang telah disebutkan secara detail sebelumnya bahwa isu kemanusiaan yang telah terjadi seperti kekerasan seksual, tentara dibawah umur, diskriminasi etnis, kelaparan, hingga ratusan ribu nyawa masyarakat yang melayang.

Maka dapat disimpulkan bahwa alasan keterlibatan atau urgensi intervensi dari Paus Fransiskus adalah karena kepeduliannya terhadap isu kemanusiaan dunia, khususnya negara-negara “pinggiran” yang mungkin kurang diperhatikan dunia. Hal ini terdorong karena peran Paus Fransiskus sebagai seorang Paus atau pemimpin agama Katolik di dunia. Sebagai pemimpin agama tentu Paus Fransiskus akan merepresentasikan dan menjalankan ajaran agama Katolik sebaik mungkin, salah satunya yaitu kepedulian terhadap sesama manusia. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa Paus Fransiskus memandang politik global sebagai ruang dimana visi kebaikan bersama harus diberlakukan tanpa memandang “bulu” setiap negara. Khususnya Paus Fransiskus mendorong terciptanya hubungan yang baik antara negara inti dengan negara periferi/pinggiran (Ferrara, 2015). Paus Fransiskus mengatakan bahwa setiap perubahan besar khususnya tentang perdamaian dapat

terwujud ketika dunia mulai memandang bukan dari negara pusat tapi dari negara periferi atau pinggiran (Spadaro, 2014). Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Paus Fransiskus sangat memperdulikan negara-negara terpinggir yang mungkin kurang mendapat perhatian dunia. Sehingga menjadi urgensi bagi Paus Fransiskus sendiri untuk dapat membantu mengupayakan perdamaian bagi Sudan Selatan.

Jika dianalisis, dapat dilihat bahwa Paus Fransiskus berusaha memanfaatkan *faith based diplomacy* atau diplomasi agama secara khusus karena adanya kesamaan agama antara pihak mediator dan pihak berkonflik. Konsep *Faith based diplomacy* sendiri merupakan bentuk diplomasi yang memadukan wawasan dan pengaruh agama dengan praktik politik internasional (Hamilton, 2003). Secara garis besar diplomasi ini memanfaatkan aspek-aspek rekonsiliasi dari keyakinan agama khususnya untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan perdamaian (Johnston, 2003). Upaya diplomasi yang dilakukan Paus Fransiskus dapat dikatakan sebagai suatu “kesempatan” yang baik karena tidak semua pihak dapat melakukan diplomasi agama seperti ini. Sehingga pada akhirnya tentu diharapkan cara diplomasi yang dilakukan Paus Fransiskus ini dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian di Sudan Selatan.

Konsep *faith based diplomacy* dapat dikatakan sebagai diplomasi baru karena pelaksanaannya masih sedikit dan baru terjadi dalam beberapa dasawarsa ini. Diplomasi agama ini lebih menjelaskan tentang rekonsiliasi daripada penyelesaian konflik. Perdamaian yang diupayakan bukanlah sekedar ketiadaan konflik melainkan tentang pemulihan hubungan yang sehat dan saling menghormati di antara para pihak. Sementara para aktor diplomasi agama (seperti Paus Fransiskus) percaya bahwa diplomasi dan sistem internasional harus berlandaskan moral, mereka juga memahami perlunya pragmatisme dalam mengejar rekonsiliasi (Johnston & Cox, 2003). Maka *faith based diplomacy* yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ini tidak berfokus sepenuhnya pada penyelesaian konflik, namun lebih kepada terciptanya perdamaian dan pemulihan hubungan.

Jika dilihat secara lebih luas *faith based diplomacy* tidak hanya mengacu atau merujuk pada agama kristen saja, namun juga terhadap semua agama atau

kepercayaan yang lain. Dengan kata lain konsep *faith based diplomacy* ini dapat dilakukan oleh para aktor dari berbagai agama yang ada di dunia. Salah satu contoh *faith based diplomacy* yang dilakukan dari agama selain kristen yaitu diplomasi agama dari Nahdlatul Ulama dengan negara Afghanistan. Secara rinci, diplomasi ini dilaksanakan oleh para ulama dari Indonesia (NU Indonesia) dan Afghanistan (Afghanistan Ulama/Mantan Tokoh Taliban & NU Afghanistan) yang bertujuan untuk mengupayakan perdamaian dan penyelesaian konflik suku di Afghanistan. Salah satu hasil dari diplomasi agama ini yaitu terciptanya MoU (Mufakat Jakarta) sebagai bentuk “perjanjian” untuk mengusahakan percepatan perdamaian di Afghanistan. Dari sini dapat dilihat juga bahwa pelaksanaan *faith based diplomacy* pada dasarnya berfokus pada upaya penciptaan perdamaian dan berusaha mengesampingkan urusan-urusan politik.

Sebagai upaya mendukung terciptanya perdamaian di Sudan Selatan, Paus Fransiskus merealisasikan konsep diplomasi agama dengan mengundang para pemimpin kelompok yang berkonflik di Sudan Selatan (kelompok pemerintah dan oposisi) untuk datang ke Vatikan. Undangan ke Vatikan tersebut tidak hanya sekedar untuk melakukan kunjungan dan diplomasi biasa, namun undangan tersebut mengajak para pemimpin untuk mengikuti kegiatan *spiritual retreat*. Dalam agama Kristen, *spiritual retreat* merupakan kegiatan rohani yang bertujuan untuk mengasingkan diri dari kegiatan dan lingkungan sehari-hari. Tujuan atau fungsi dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kehidupan rohani seseorang dan lebih mendekatkan diri kepada kehendak Tuhan (Stone, 1919), serta sebagai upaya bagi seseorang untuk memperbaiki cara hidup, perbuatan, tingkah laku yang salah.

Dalam kasus ini, kegiatan *spiritual retreat* yang diadakan berusaha untuk berfokus pada masa depan yang damai dan sejahtera bagi Sudan Selatan. Dimana tentu tujuan akhir yang diharapkan dari kegiatan ini nantinya adalah berakhirnya perang saudara secara menyeluruh dan terciptanya perdamaian di Sudan Selatan. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan *spiritual retreat* ini bukan sekedar kegiatan rohani biasa namun juga sebagai kegiatan diplomasi dan bantuan bagi Sudan Selatan. Kegiatan tersebut juga merupakan bentuk nyata dari *faith based diplomacy* yang dilakukan oleh Paus Fransiskus sebagai keterlibatan dalam upaya perdamaian Sudan Selatan.

Sekitar empat tahun setelah Paus Fransiskus mengadakan kegiatan *spiritual retreat* bagi para pemimpin Sudan Selatan, ternyata Paus Fransiskus masih konsisten dalam mendukung dan mendorong perdamaian Sudan Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya suatu kegiatan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus yaitu kunjungan kepausan ke Sudan Selatan. Kunjungan kepausan sendiri merupakan kegiatan rutinitas yang biasa dilakukan oleh seorang Paus, kegiatan ini merupakan kunjungan seorang Paus ke suatu negara dengan tujuan rohani sekaligus tujuan diplomatis. Dari sisi rohani, kegiatan yang dilakukan yaitu seperti kunjungan ke berbagai gereja dan lembaga katolik, melakukan ibadah bersama masyarakat yang beragama katolik, dan bertemu serta berbincang dengan para rohaniawan atau biarawan-biarawati di negara tersebut. Lalu dari sisi diplomatis, seorang Paus juga akan bertemu dengan para pemimpin negara untuk mendiskusikan isu yang sedang terjadi di negara tersebut, serta Paus juga akan bertemu dengan pihak-pihak yang mungkin perlu mendapat perhatian dari Paus seperti masyarakat sipil, buruh, korps diplomatik, para pengungsi dan yang lainnya.

Kunjungan kepausan ini juga kerap disebut dengan istilah *pastoral visit* atau kunjungan pastoral. Paus Fransiskus juga memberi nama kegiatan kunjungan kepausan ke Sudan Selatan dengan istilah *pilgrimage of peace* atau ziarah perdamaian. Hal ini berarti sudah jelas bahwa kedatangan Paus Fransiskus ke Sudan Selatan bertujuan untuk mengajak para pemimpin serta masyarakat Sudan Selatan untuk bersama-sama menciptakan dan menjaga perdamaian negara. Meskipun pada dasarnya kegiatan kunjungan kepausan merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan oleh setiap Paus, namun kehadiran Paus Fransiskus kali ini dilakukan tidak hanya untuk menjalani rutinitas semata tetapi juga untuk mengupayakan terciptanya perdamaian dunia. Kunjungan seorang Paus tentu akan berbeda dengan kunjungan presiden, duta besar, diplomat, dan aktor yang lainnya, dimana mereka cenderung berfokus pada bidang politik atau ekonomi sedangkan kunjungan Paus lebih berfokus pada tujuan agama dan sosial.

Sasaran diplomasi agama yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ini adalah para petinggi atau pemangku jabatan pemerintah di Sudan Selatan. Dengan kata lain diplomasi ini mengupayakan adanya perdamaian dari tingkat tertinggi di pemerintahan dahulu, lalu diharapkan dapat tersebar ke tingkat paling rendah yaitu

masyarakat luas. Hal ini dilakukan karena melihat kembali bahwa salah satu penyebab terjadinya perang saudara ini yaitu karena adanya perselisihan dalam pemerintahan Sudan Selatan khususnya antara para petinggi di pemerintahan. Selain itu cara diplomasi yang dipilih oleh Paus Fransiskus ini dapat dikatakan sebagai cara yang paling efektif jika dibandingkan cara lainnya hal ini karena melihat posisi dan peran Paus Fransiskus di panggung internasional. Namun karena diplomasi ini lebih berfokus pada pihak elit atau pemerintahan maka kemungkinan dapat terjadi kegagalan pada tingkat *grassroots* atau masyarakat. Maka capaian atau output dari diplomasi ini bisa berhasil dan juga bisa gagal dari harapan Paus Fransiskus yaitu perdamaian. Tentu hal ini dapat terjadi karena tidak mudah untuk dapat mengatur dan menyamakan suara masyarakat yang jumlahnya sangat banyak, sehingga berbagai kemungkinan dapat terjadi dari hasil diplomasi agama ini.

Penelitian Terdahulu

Dalam membuat tesis ini penulis menggunakan beberapa sumber literatur untuk memperkuat dan menunjang argumen yang tertulis disini. Karena isu utama yang dipilih dalam tulisan ini cenderung baru dan tidak terdapat penelitian terdahulu yang serupa, maka penulis memilih menggunakan literatur atau penelitian terdahulu yang memiliki kaitan atau masih menyinggung dengan isu utama tulisan ini. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penulisan tesis ini berusaha memberikan penjelasan tentang topik yang umum hingga topik yang lebih spesifik.

1. Perdamaian dan Konflik

Pengelompokkan penelitian terdahulu yang pertama yaitu tentang perdamaian dan konflik, dimana penulis menggunakan buku yang cukup terkenal dalam ilmu hubungan internasional yaitu **Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization** (Galtung, 1996). Galtung menjelaskan perdamaian merupakan ketiadaan atau upaya pengurangan segala jenis kekerasan dan konflik pada suatu negara. Sedangkan konflik dijelaskan dengan kekerasan yang terjadi karena adanya kontradiksi baik dengan diri sendiri atau pihak lain. Kedua hal ini dapat dilihat dalam kasus perang saudara Sudan Selatan, dimana konflik sebagai realita yang sedang terjadi dan perdamaian sebagai ekspektasi yang ingin dicapai.

2. Perang Saudara

Selanjutnya terdapat kelompok penelitian terdahulu yang memiliki tema terkait perang saudara, khususnya untuk menjelaskan dasar-dasar tentang perang saudara. **Civil War** (Collier dan Hoeffler, 2007) merupakan salah satu bab dalam sebuah buku. Collier dan Hoeffler menjelaskan perang saudara sebagai konflik atau kekerasan yang terjadi dalam suatu negara dimana menimbulkan banyak kerugian (korban jiwa), terjadi dalam waktu yang cukup lama, dan terjadi pada wilayah yang cukup luas

3. Perang Saudara Sudan Selatan

Kelompok penelitian terdahulu selanjutnya yaitu memiliki tema tentang perang saudara Sudan Selatan. Artikel yang pertama yaitu **South Sudan conflict from 2013 to 2018: Rethinking the causes, situation and solutions** (Nyadera, 2018). Nyadera menjelaskan bahwa salah satu solusi yang dapat diberikan untuk konflik multi-sisi ini yaitu diperlukan adanya pendekatan perdamaian tanpa adanya ambisi politik dan ekonomi antar para pemimpin. Artikel yang kedua yaitu berjudul **Comprehensive Analysis of South Sudan Conflict: Determinants and Repercussions** (Afriyie, Jisong & Appiah, 2020). Mereka menjelaskan bahwa terdapat enam faktor yang mendorong konflik Sudan Selatan yaitu persaingan politik (pemimpin); etnis; sumber daya alam dan korupsi; kurangnya keadilan pada HAM; ekonomi yang kurang terurus dengan baik dan kurangnya lembaga internal untuk menengahi konflik.

4. Konsep Faith Based Diplomacy

Pada kelompok penelitian terdahulu ini, buku dan artikel jurnal yang dipilih oleh penulis berusaha untuk menjelaskan konsep Faith Based Diplomacy dengan jelas. Sumber yang pertama merupakan buku yang berjudul **Faith-based Diplomacy: Trumping Realpolitik** karya Douglas Johnston (2003). Dijelaskan bahwa *faith based diplomacy* merupakan jenis diplomasi yang menggunakan elemen agama, dimana pada umumnya dilakukan oleh tokoh agama yang memiliki beberapa karakteristik tertentu dan dapat melakukan beberapa jenis intervensi. Sumber yang kedua yaitu artikel berjudul **Faith-Based Diplomacy: An**

Opportunity to Prevent Conflict (Borjas, 2022), dimana dijelaskan bahwa diplomasi agama menawarkan pendekatan yang unik sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik pada suatu negara dan menjadi peluang baru untuk menciptakan perdamaian antar negara.

5. Paus Dalam Hubungan Internasional

Kelompok penelitian terdahulu yang terakhir ini merupakan buku dan artikel jurnal yang menjelaskan tentang peran dan eksistensi Paus dalam hubungan internasional. Sumber yang pertama merupakan buku **The Pope, the Public, and International Relations: Postsecular Transformations** (Barbato, 2020), yang menjelaskan bahwa Paus dan Tahta Suci merupakan aktor hibrid yang cukup penting dalam studi hubungan internasional baik dalam urusan agama maupun urusan kenegaraan. Selanjutnya merupakan artikel jurnal yang berjudul **Pope Francis on War and Peace** (Braun, 2018) dijelaskan bahwa Paus Fransiskus memiliki tugas penting sebagai seorang Paus yaitu menyebarkan dan mengajarkan visi perdamaian bagi dunia, khususnya dengan menerapkan model persaudaraan dalam mengupayakan perdamaian. Yang terakhir yaitu artikel jurnal yang berjudul **Peran Paus Fransiskus Dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dan Kuba** (Sheila, et al, 2017), dimana artikel ini menjelaskan tentang kontribusi dari Paus Fransiskus dalam penyelesaian konflik antar negara dengan memanfaatkan *faith based diplomacy*. Artikel ini menjadi cukup penting karena menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam tesis ini dengan melihat salah satu contoh bentuk *faith based diplomacy* dalam studi kasus yang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Pada era kontemporer ini perang saudara menjadi perhatian penting bagi para aktor internasional, pasalnya dampak yang terjadi akibat perang saudara sangatlah merugikan kehidupan masyarakat dan negara. Perang saudara Sudan Selatan salah satu contohnya, perang ini telah berlangsung cukup lama dan memberikan berbagai dampak buruk yang sangat parah bagi masyarakat disana. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakmampuan pemerintah disana mengatasi masalah tersebut dengan cepat. Para aktor

internasional pun dengan sigap berusaha membantu Sudan Selatan agar konflik perang saudara tersebut dapat diatasi secepatnya. Paus Fransiskus salah satunya yang berkontribusi dalam membantu mengusahakan perdamaian Sudan Selatan khususnya melalui diplomasi agama. Kehadiran Paus Fransiskus disini berperan sebagai pemimpin negara sekaligus tokoh agama, sehingga diharapkan keterlibatannya dapat memberikan pengaruh lebih bagi para pihak yang berkonflik disana.

Upaya-upaya yang dilakukan Paus Fransiskus juga bersifat kegiatan agamis yaitu *spiritual retreat* dan kunjungan kepausan, yang tentu kegiatan tersebut merupakan bentuk konkret dari diplomasi agama yang hendak dilakukan. Keterlibatan dan kontribusi Paus Fransiskus ini telah menarik perhatian penulis untuk mengangkat tema terkait hal tersebut. Secara khusus karena melihat aksi yang dilakukan Paus Fransiskus tentu tidak bisa ditiru oleh setiap aktor internasional. Terlebih lagi diplomasi yang dilakukan Paus Fransiskus adalah diplomasi agama dan melakukan kegiatan agamis seperti *spiritual retreat* dan kunjungan kepausan sebagai pendorong penerapan diplomasi tersebut. Sehingga hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap fenomena tersebut. Maka dari uraian di atas muncul suatu pertanyaan penelitian yaitu **“Bagaimana bentuk keterlibatan Paus Fransiskus dalam menjalankan diplomasi agama sebagai upaya perdamaian bagi Sudan Selatan?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan penjelasan pada bagian Latar Belakang dan Rumusan Masalah sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan hasil analisis dari tindakan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam berkontribusi bagi perdamaian di Sudan Selatan. Secara khusus untuk mengetahui dengan jelas bentuk keterlibatan Paus Fransiskus dalam menjalankan *faith based diplomacy* sebagai upaya perdamaian bagi Sudan Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tema skripsi yang diangkat dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan karya tulis ini dapat memberikan manfaat seperti:

1) Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian dan analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi studi hubungan internasional. Secara khusus memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para akademisi tentang peran Paus Fransiskus dalam dinamika politik internasional khususnya bagi perdamaian dunia. Penulis berharap penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru bagi para akademisi tentang kegiatan diplomasi agama secara khusus yang dilakukan oleh Paus Fransiskus.

2) Manfaat Praktis

Selain diharapkan dapat berguna bagi para akademisi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi. Penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi referensi dan perbandingan bagi penelitian kedepannya khususnya terkait peran Paus Fransiskus dalam perdamaian internasional dengan diplomasi agama.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama ini penulis menjelaskan terlebih dahulu terkait latar belakang dari tema yang diangkat dalam skripsi ini. Latar belakang tersebut terdiri dari pembahasan umum dan mendasar tentang perdamaian dan konflik; pembahasan tentang perang saudara dan kontribusi aktor internasional; sedikit pembahasan tentang Paus Fransiskus dan perang saudara Sudan Selatan; dan menyinggung sedikit terkait inti dari bab pembahasan nantinya yaitu tentang diplomasi agama serta kegiatan *spiritual retreat* dan *kunjungan kepausan*. Penulis juga menyertakan beberapa sumber literatur atau *literature review* yang nantinya digunakan untuk menganalisis studi kasus yang telah ditentukan. Selanjutnya penulis juga menjelaskan beberapa hal lainnya yaitu rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian bagi akademisi dan praktisi, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini penulis membahas tentang konsep dan teori yang digunakan untuk membantu penulis menganalisis dan meneliti terkait tema yang diangkat. Konsep dan teori penelitian ini berasal dari berbagai sumber literatur yaitu buku, artikel jurnal, dan skripsi. Bab kedua ini juga memberikan gambaran umum dalam bentuk kerangka pemikiran yang menjelaskan alur pemikiran dimulai dari latar belakang hingga mencapai kesimpulan atau akhir dari penelitian dan analisis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ketiga ini merupakan metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian dan analisis dalam tesis ini. Metode penelitian ini menjabarkan secara lengkap tentang objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana waktu. Dimana setiap penjabaran metode tersebut ditentukan dengan sebaik mungkin agar dapat membantu dan mempermudah penulis dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian tentang topik yang diangkat.

BAB IV Keterlibatan Paus Fransiskus dalam Penyelesaian Perang Saudara Sudan Selatan

Bab keempat ini menjadi awal dari bagian pembahasan terkait tema yang diangkat dalam skripsi ini. Pada bab ini penulis berusaha menjelaskan tentang keterlibatan Paus Fransiskus dalam penyelesaian perang saudara Sudan Selatan. Secara khusus bab ini menjelaskan keterlibatan Paus Fransiskus dengan menggunakan *faith based diplomacy* dalam penyelesaian perang saudara Sudan Selatan. Dimana hal yang dibahas seperti kompleksitas perang saudara Sudan Selatan dan faktor pendorong keterlibatan Paus Fransiskus dalam mengupayakan perdamaian bagi Sudan Selatan. Kedua hal tersebut menjadi penting dibahas dalam bab ini untuk melihat berbagai alasan dan dorongan terkait keterlibatan Paus Fransiskus dalam penyelesaian perang saudara Sudan Selatan.

BAB V Bentuk *Faith Based Diplomacy* Paus dalam Mengupayakan Perdamaian bagi Sudan Selatan

Pada bab ini penulis berusaha menjelaskan tentang bentuk *faith based diplomacy* yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam upaya perdamaian di Sudan Selatan. Diplomasi agama merupakan salah satu cara yang tepat bagi Paus Fransiskus karena ia memiliki kemampuan di panggung internasional sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Beberapa bentuk *faith based diplomacy* yang dilakukan oleh Paus Fransiskus yaitu dengan melaksanakan kegiatan *spiritual retreat* bagi para pemimpin politik Sudan Selatan di Vatikan dan melakukan kunjungan kepausan atau kunjungan kepausan ke Sudan Selatan. Pada bab ini penulis berusaha menjelaskan secara rinci mengenai *spiritual retreat* dan kunjungan kepausan sebagai bentuk *faith based diplomacy* yang dilakukan oleh Paus Fransiskus bagi perdamaian Sudan Selatan.

BAB VI Penutup

Pada bab keenam dan terakhir ini penulis memaparkan kesimpulan dan saran terkait topik pada skripsi ini. Kesimpulan menjadi rangkuman seluruh tulisan ini, menyampaikan penyederhanaan pembahasan, dan menjawab pertanyaan penelitian. Saran dibuat penulis untuk memberikan usulan dan pendapat terkait masalah yang diangkat baik bersifat praktis atau teoritis.